

## **PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PROPINSI BANTEN**

**Suharwanto**

Kepala SMU AEIF Rahman Hakim Parigi Kota Tangerang Selatan

### **Abstract**

Development and improvement of education quality should be developed and developed in Banten Province with the appropriate system of National Education Standards. School accreditation is a series of quality development process of Education, because in the implementation of Accreditation contains 8 Education Standards Education

*Keywords : Improvement and development of Quality of Education refers to National Education Standards*

### **Abstrak**

Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan hendaknya dibangun dan dikembangkan di Propinsi Banten dengan system yang sesuai Standar Nasional Pendidikan. Akreditasisekolah merupakan serangkaian proses pengembangan mutu Pendidikan, karena dalam pelaksanaa Akreditasi memuat 8 Standar Nasional Pendidikan.

*Kata kunci : Peningkatan dan pengembangan Mutu Pedidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penjaminan mutu pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Tolok ukur penjaminan mutu dapat dilihat dari ketercapaian indikator-indikator mutu penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan BNSP dalam delapan standar nasional pendidikan (SNP).

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa.

Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di propinsi Banten secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.

BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 87 ayat (2).

Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Tujuan diadakannya kegiatan akreditasi sekolah/madrasah ialah (1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, (2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan (3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adadua rumusan masalah yang akan dijabarkan penulisdalam makalah ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud Penjaminan Mutu Pendidikan?
2. Apakah yang dimaksud Akreditasi Sekolah?

## **II. Pembahasan**

### **A. Penjaminan Mutu Sekolah**

#### **1. Teori Mutu**

Dalam manajemen mutu, ada dua konsep tentang mutu atau *quality*, yaitu konsep klasik dan konsep modern. Konsep klasik bersifat absolut, sementara konsep modern bersifat relatif. Dalam konsep klasik, mutu suatu produk ditentukan oleh produsen sedangkan dalam konsep modern mutu ditentukan oleh konsumen atau tergantung pada penilaian konsumen. Dalam konsep klasik ini mutu menunjukkan kepada sifat yang menggam-barkan derajat “baik” nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga.

Adapun dalam konsep modern (relatif) mutu menunjukkan kepada sifat suatu produk apakah memuaskan konsumen atau tidak. Ali (2000; 28) menambahkan bahwa pada konsep mutu yang bersifat absolut, derajat (*degree*) baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang atau jasa itu serta tingginya standar atau tingginya penilaian dari lembaga yang memproduksi atau memasok barang itu. Sedangkan dalam konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu ber-gantung pada penilaian dari pelanggan yang memanfaat-kan produk tersebut.

Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi, bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Atas dasar kriteria ini produsen menentukan kualitas barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu, dalam rangka mana-jemen produksi agar menghasilkan produk yang bermutu di lembaga yang bersangkutan biasanya ada bagian atau divisi yang menjalankan fungsi pengendalian mutu (*quality control*) yang bertu-gas membuat penilaian (*judg-ment*) berdasarkan kriteria tertentu terhadap barang yang diproduksi sebelum dilempar ke pasar, apakah termasuk ka-tagori tidak bermutu, bermutu atau bermutu tinggi (Tjiptono dan Diana, 1996).

Filosofi klasik tentang mutu dewasa ini telah beru-bah. Perubahan itu dapat diidentifikasi dari orientasinya yang semula pada produsen telah bergeser pada pelang-gan. Mutu suatu produk bu-kan ditentukan oleh produsen, melainkan ditentukan oleh pelanggan dengan kriteria yang digunakan adalah me-muaskan atau memenuhi ke-butuhan pelanggan (Rinehart, 1993 dalam Ali, 2000; 32). Mutu suatu produk adalah paduan sifat-sifat produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pe-langgannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat (Tjip-tono dan Diana, 1996; dan Sallis, 1993).

## **2. Mutu dalam Konteks Se-kolah**

Praktek pendidikan dapat dianalogikan dengan industri khususnya industri jasa. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa (*service*) kepada para pe-langgannya. Pelanggan jasa pendidikan yang di produksi oleh sekolah terdiri dari pelanggan primer yaitu siswa, pelanggan sekunder yaitu orang tua dan masyarakat atau penyandang dana, dan pelanggan tersier yaitu pemakai lulusan sekolah yang terdiri dari lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja. Pelanggan sekunder dan tersier, yaitu orang tua, masyarakat penyandang dana dan pemakai lulusan, bisa disebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah (*stake-holders*).

Dengan berpegang kepada konsep mutu sebagaimana dijelaskan di atas, apabila konsep modern digunakan, maka mutu sekolah haruslah ditentukan oleh pelanggannya, yakni siswa dan

*stakeholders*, bukan oleh produsen yaitu sekolah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan layanan atau jasa pendidikan yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para pelanggannya.

Apakah sekolah dapat memberi layanan yang sesuai atau melebihi kepuasan para pelanggannya merupakan pertanyaan kunci dalam menilai mutu suatu sekolah. Untuk menilainya diperlukan adanya kriteria-kriteria penilaian pada masing-masing dimensi mutu. Menurut Sanusi (1990), dimensi-dimensi itu meliputi dimensi hasil belajar, dimensi mengajar, bahan kajian, dan dimensi pengelolaan. Dimensi hasil belajar dapat dipandang sebagai mutu output sedangkan dimensi pengelolaan dan mutu mengajar sebagai mutu proses, sementara dimensi bahan kajian sebagai mutu input. Berbagai dimensi tersebut dapat dipandang sebagai sumber-sumber mutu sekaligus sebagai fokus mutu dalam penjaminan mutu sekolah.

### **3. Manajemen Mutu pada Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan**

Manajemen mutu merupakan suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi (Tenner dan De toro dalam Ali: 626:2007). Penjaminan mutu (*Quality Assurance/ QA*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen *input*, komponen proses dan hasil atau *out-come* sesuai dengan yang diharapkan oleh *Stake holders* (UNESCO, 2006).

### **4. Pelaksanaan, dan Proses Penjaminan Mutu Sekolah**

Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi yang dilakukan dengan cara mengaktifkan setiap langkah yang dilaksanakan, memperhatikan setiap sumberdaya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jika terjadi kekeliruan maka segera dilakukan perbaikan sehingga bisa dihin-

dari terjadinya kerugian. Selain pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, perbaikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Penerapan seperti ini dalam manajemen mutu mempunyai dampak terhadap produk yang dihasilkan, karena pencegahan kesalahan dalam memproses produksi yang dilakukan secara terus menerus dan pengawasan yang ketat.

Dalam pendidikan, logikanya sebagaimana yang diterapkan manajemen produksi seperti di atas, juga dapat diterapkan di dalam manajemen pendidikan. Oleh sebab itu penjaminan mutu ini dapat diterapkan dalam manajemen mutu pendidikan, karena merupakan suatu pemantauan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam rangka memenuhi pencapaian mutu yang baik untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memfokuskan penilaian dan pengembangan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan penjaminan mutu ini yang ada bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga yang ada diluar organisasi yang bersifat independen secara khusus menjalankan evaluasinya agar terpenuhinya standar mutu untuk akreditasi atau sertifikasi. Penjaminan mutu secara informal, dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu (*quality circle*) dalam organisasi itu sendiri (*internal*) dengan tugas utama adalah menentukan standar mutu, sistem penilaian, dan mengembangkan instrumen untuk melakukan penilaian atau audit tersebut.

Dalam penentuan, *quality standart* merupakan langkah pertama yang harus diambil dalam konteks penjaminan mutu formal maupun informal. Penjaminan mutu formal melalui ISO yaitu merupakan aplikasi dan prinsip penjaminan mutu yang di dalamnya menentukan proses dan sistem yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan untuk menjamin suatu produksinya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, untuk mendapat sertifikasi dari badan internasional.

Dalam rangka menuju kearah pembakuan mutu pendidikan sebagaimana yang dilakukan sertifikasi melalui ISO terhadap pendidikan, perlu ditetapkan lebih dahulu apa yang menjadi fokus penjaminan mutu pendidikan. Menurut

*Departemen For Education and childrens Services* (1996), menekankan agar penjaminan mutu di fo-kuskan pada proses dan hasil pendidikan. Dalam upaya menerapkan model penjaminan mutu pendidikan ini maka perlu adanya komitmen yang tinggi, penilaian kebutuhan, perencanaan strategik, penyusunan rencana taktis, dan penilai kemajuan. Penerapan penjaminan mutu ini sangat penting dalam penerapan ma-najemen pendidikan berbasis sekolah.

Dalam *Directorate of Quality Assurance*, ada tiga komponen sistemik dari penjaminan mutu yang dikembangkan yaitu 1) belajar dan mengajar, 2) kepemimpinan dan budaya, serta 3) pe-ngembangan dan manajemen sekolah.

Pertama, komponen belajar mengajar meliputi lingkungan belajar, proses belajar peserta didik, proses mengajar, perencanaan dan penerapan mengajar, penguasa-an dan pelaporan, serta peni-laian dan refleksi.

Kedua, kepempi-nan dan budaya meliputi ke-pemimpinan kontekstual, ke-pemimpinan untuk peruba-han, kepemimpinan inklusif, kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya, mengem-bangkan rasa memiliki, buda-ya belajar, budaya peningka-tan, dan pengembangan seko-lah.

Ketiga, tata laksana meliputi tujuan sekolah, penetapan prioritas, perencanaan, tata laksana peningkatan yang terencana, dan tata laksana perubahan fundamental.

Indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam peni-laian yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu, me-liputi empat hal yakni sebagai berikut.

- a. manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek kepemimpinan, perencanaan, dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan biaya, sumber da-ya dan pemeliharannya dan evaluasi diri.
- b. pembelajaran yang meli-puti aspek-aspek kuriku-lum, pengajaran, proses belajar, peserta didik dan penilaian.
- c. dukungan kepada peserta didik dan etos kerja se-kolah yang meliputi as-pek bimbingan, pengem-bangan kepribadian dan

sosial peserta didik, dukungan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orang tua dan masyarakat dan iklim sekolah.

- d. prestasi belajar meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis.

Proses mutu dilakukan tiga tingkatan yakni tingkatan sekolah, tingkatan teritorial dan tingkatan internasional. Khusus mengenai di tingkat sekolah setiap sekolah merencanakan pengembangan atas dasar tujuan kemudian melaksanakan rencana tersebut. Dalam rangka penjaminan mutu sekolah diperlukan evaluasi diri dan membuat laporan tahunan setiap tahunnya. Sekolah memiliki fungsi pendidikan yang fundamental dalam meningkatkan kemajuan pendidikan.

Dari bagan tersebut dapat dipaparkan penjelasan bahwa:

- a. Dimensi-dimensi mutu pendidikan secara keseluruhan pada hakekatnya merupakan penjaminan agar sekolah tersebut dapat mengantarkan peserta didiknya mencapai kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi.
- b. Mutu lulusan sekolah ditandai oleh kompetensi yang dimiliki siswa yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi.
- c. Kompetensi ini dapat dicapai melalui proses yang mencakup pemberian layanan dari kurikulum dan proses belajar mengajar, lingkungan dan kultur sekolah yang kondusif, penyelenggaraan administrasi sekolah dan manajemen sekolah yang baik, keikut-sertaan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, pembinaan organisasi dan kelembagaan sekolah dengan baik serta dukungan pembiayaan yang memadai, memiliki tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pendidik, serta dipenuhinya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- d. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan penerima lulusan sekolah baik jenjang berikutnya maupun lapangan pekerjaan.

## **B. Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia**

### **1. Pengertian Akreditasi Sekolah**

Akreditasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan.

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

### **2. Tujuan Akreditasi Sekolah**

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 60, menyebutkan bahwa sekolah perlu dilakukan akreditasi karena :

- a. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- c. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya PP No.19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan akreditasi sekolah, sertifikasi guru, dan evaluasi pendidikan.

### **3. Pelaksana Kewenangan Akreditasi Sekolah**

Pelaksanaan akreditasi ditetapkan dalam Permendiknas No.29 tahun 2005, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). BAN-SM ini merupakan badan non struktural yang bersifat nirlaba dan

mandiri yang bertanggungjawab kepada Mendik-bud. Secara struktural ditingkat Propinsi dibentuklah Ba-dan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah atau BAP-SM.

Kelembagaan akreditasi terdiri dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Apabila diperlukan BAP-SM dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) Kabupaten/Kota. BAN-S/M berkedudukan di ibukota negara, BAP-S/M berkedudukan di ibukota provinsi, UPA-S/M dibentuk oleh BAP-S/M sesuai keperluan dan kondisi pada masing-masing provinsi.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi S/M. Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melaksanakan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB. Unit Pelaksana Akreditasi (UPA)-Kabupaten/Kota membantu BAP-S/M melaksanakan akreditasi.

#### **4. Manfaat Akreditasi Sekolah**

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat sebagai berikut.

- a. dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah,
- b. dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional,
- c. dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah.
- d. membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya,

#### **5. Peranan Akreditasi dalam Penjaminan Mutu Sekolah**

Permasalahan mutu pendidikan di Provinsi Ban-ten pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masu-kan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pen-didikan masing-masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Faktor masukan yakni anak didik yang dipengaruhi oleh ber-bagai faktor, demikian juga proses pembelajaran juga di-pengaruhi oleh berbagai fak-tor sehingga akan memenga-ruhi hasil atau keluaran dari pendidikan itu sendiri. Hasil dari akreditasi yang merupa-kan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidi-kan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP.

Masukan dari pihak eksternal dan hasil akreditasi yang merupakan hasil kela-yakan satuan Pendidikan yang bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan standar na-sional pendidikan berupa pen-capaian hasil evaluasi lainnya yang dilakukan oleh pihak ekstrenal terhadap sekolah/madarasah. Mutu pada satuan pendidikan mempunyai mak-na menghasilkan dan mem-berikan yang terbaik, karena Penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Banten ini ber-tujuan untuk memenuhi atau jika perlu melampaui standar nasioal pendidikan yang telah ditetapkan.

Komponen-komponen yang perlu diperhatikan da-lam pengembangan mutu dan yang harus di evaluasi adalah masukan, proses, hasil bela-jar, dan manfaat hasilnya nanti. Input dalam hal ini para pelajar/siswa dipengaruhi oleh latar belakang kognitif siswa, keadaan sosial ekono-mi, keadaan lingkungan tem-pat tinggal siswa itu sendiri.

Kegiatan pembelaja-ran dipengaruhi oleh sistem kurikulum, sistem pelayanan dan administrasi, sitem pe-nyajian atau metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Dari proses pembelajaran akan menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sikap kepribadian yang bermoral Pancasila, dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan suatu pekerja-an nantinya.

Dengan demikian be-tapa pentingnya proses pem-belajaran dengan semua as-pek lainnya agar tercapai ha-sil pembelajaran yang baik. Jika hasil pendidikan ini ber-manfaat dan dapat diterima oleh semua pihak atau pe-langgan merasa

puas, maka akan dikatakan sekolah itu bermutu. Akreditasi adalah salah satu alat yang diguna-kan oleh pemerintah dalam menjamin mutu pendidiki-kan dan sekolah di Propinsi Banten

### **III. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengembangan dan pe-ningkatan mutu pendidiki-kan harus dibangun dan dikembangkan di Propinsi Banten dengan system yang sesuai SNP. dalam upaya meningkatkan daya saing, citra, dan akuntabi-litas publik. Akreditasi merupakan serangkaian proses dan sistem me-ngumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja satuan pendidikan. Dua reko-mendasi utama yang pe-nulis kemukakan dalam upaya pengembangan dan pe-ningkatan mutu sistem akreditasi sekolah/madra-sah adalah (1) kebutuhan teknologi untuk sistem akreditasi sekolah/madra-sah, dan (2) pengukuran dampak atau manfaat dari sistem akreditasi yang ter-integrasi TIK. Pemetaan Kebutuhan Teknologi De-sain Sistem Komputeri-sasi Akreditasi Sekolah/Madrasah dilakukan un-tuk memberikan reko-mendasi berupa pemetaan kebutuhan teknologi beru-pa sistem komputerisasi untuk menciptakan laya-nan prima yang sesuai dengan prinsip reformasi layanan dan undang-un-dang pelayanan publik.
2. Kegiatan penjaminan mu-tu tertuju pada proses un-tuk membangun keperca-yaan dengan cara melaku-kan pemenuhan persyar-atan atau standar mini-mum pada komponen *in-put*, komponen proses dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stake holders*.
3. Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan pendidiki-kan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Masukan dari pihak ek-ternal dan hasil akredi-tasi yang merupakan hasil kelayakan satuanpendidiki-kan bermanfaat bagi sa-tuan pendidikan dan in-stansi terkait untuk dijadi-kan kebijakandantindaklanjutdalam pembinaan

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Syarwani. 2010. *Akreditasi Sekolah Mu-ara Peningkatan Mutu Pendidikan.* (online). <http://univpgripalembang.ac.id:2095/penelitian/Akreditasi%20Sekolah%20Muara%20Peningkatan%20Mutu-%202.pdf>. Diakses tanggal 12 November 2014.
- Ali, M. 2000. *Sistem Pen-jaminan Mutu dalam Manajemen Mutu Pen-didikan.* Jurnal Mimbar Pendidikan, No.1 Ta-hun XIX.
- BAN.SM.2011. *Pengertian Akreditasi Sekolah/Mad-rasah.* (Online). [http:// jakarta.bapsm-dki.or. id/berita/read/pengertian-akreditasi-sekolah-madrasah](http://jakarta.bapsm-dki.or.id/berita/read/pengertian-akreditasi-sekolah-madrasah). Diakses tanggal 12 November 2014
- Fatah, Nanang. 2012. *Sistem Penjaminan Mutu Pen-didikan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Haryati, Sri. 2012. *Pengem-bangan dan Pening-katan Mutu Pendidikan Se-kolah dan Madrasah Melalui Proses Akre-ditasi.* (Online). [http:// www.polines.ac.id/ragam/index\\_files/jurnalragam/ragam\\_des\\_8\\_2012.pdf](http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/jurnalragam/ragam_des_8_2012.pdf). Diakses tanggal 12 November 2014.
- Hidayati, Alif noor. 2014. *Penjaminan Mutu di Satuan Pendidikan.* (Online) [http:// www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/karya-tulis-ilmiah/817-penja-minan-mutu-di-satuan-pendidikan](http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/karya-tulis-ilmiah/817-penja-minan-mutu-di-satuan-pendidikan). Diakses tanggal 12 November 2014.
- Meirawan, Danny. 2010. *Pen-jaminan Mutu Satuan Pendidikan sebagai U-paya Pengendalian Mu-tu Pendidikan secara Nasional dan Otonomi Pendidikan.* (Online). [http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR.\\_PEND.TEKNIK\\_SIPIL/196205041988031-DANNY\\_MEIRAWAN/MAKALAH\\_Penjaminan\\_Mutu\\_Satuan\\_Pendidikan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND.TEKNIK_SIPIL/196205041988031-DANNY_MEIRAWAN/MAKALAH_Penjaminan_Mutu_Satuan_Pendidikan.pdf). Diakses tang-gal 12 November 2014.
- Moerdiyanto. 2013. *Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pen-didikan (SPPMP) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.* (Online).

*<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Drs.%20Moerdiyanto,%20M.Pd./ARTIKEL%20PENJAMINAN%20MUTU%20PENDIDIKAN.pdf>*. Diakses tanggal 12 November 2014.

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Diakses tanggal 12 November 2014

Sallis, E. 1993. *Total Quality Management In Education*. London: kogan Page Ltd.

Sanusi, Achmad. 1990. *Beberapa Dimensi Pendidikan*. Fakultas Pasca Sarjana : IKIP Bandung.

Suharwanto, 2003, Hubungan Akreditasi terhadap peningkatan Mutu Manajemen SLTP swasta di Kabupaten Tangerang, tesis

Suharwanto. 2014. Dampak Akreditasi Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Jurnal Alasma

Tjiptono, F. dan Diana, A. 1996. *Total Quality Management*. Yogya-karta: penerbit Andi